



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 173 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Kebijakan pemenuhan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 berfokus pada:
- a. penataan pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah;
  - b. pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
  - c. perekrutan talenta-talenta baru; dan
  - d. pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- KEDUA : Jenis Pengadaan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024 meliputi:
- a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Eks THK II dan pegawai non-ASN; dan
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA terdiri dari:
- a. Jabatan Fungsional; dan
  - b. Jabatan Pelaksana.

- KEEMPAT : Instansi Pemerintah menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai ASN yang disetujui oleh Menteri serta mengacu pada Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Rincian kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT paling sedikit memuat:
- a. jenis pengadaan;
  - b. nama jabatan;
  - c. deskripsi jabatan;
  - d. kualifikasi pendidikan;
  - e. alokasi formasi;
  - f. unit penempatan; dan
  - g. rentang penghasilan.
- KEENAM : Rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA disampaikan melalui layanan elektronik yang mengacu pada petunjuk teknis yang disusun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- KETUJUHH : BKN melakukan validasi terhadap rincian kebutuhan pegawai ASN yang terdiri atas jenis pengadaan, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan pada masing-masing kategori jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Hasil validasi kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETUJUHH disampaikan kepada Menteri dalam bentuk pertimbangan teknis untuk selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebutuhan pegawai ASN.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI  
NOMOR 173 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN  
2024

PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan mandat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai dengan nilai dasar Aparatur Sipil Negara, proses seleksi menjadi Aparatur Sipil Negara memegang peranan penting sebagai pintu awal dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Prinsip yang diterapkan adalah berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun di tahun 2024 beberapa prioritas dalam proses pemenuhan Aparatur Sipil Negara secara nasional, yaitu memenuhi kebutuhan secara nasional untuk layanan dasar seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan, perekrutan talenta-talenta baru, pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pemenuhan jabatan untuk pengawasan program Pembangunan di Instansi Pemerintah, sehingga diharapkan putra-putri lulusan terbaik dapat ikut berkompetisi dalam seleksi calon ASN.

Selain itu, terdapat amanat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka perlu disusun

kebijakan perencanaan kebutuhan sebagai dasar untuk melakukan penataan Aparatur Sipil Negara secara terencana dan berkesinambungan.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan pemerintahan di Ibukota Negara Nusantara, Pemerintah juga menyiapkan rekrutmen ASN untuk Ibukota Negara Nusantara, yang akan menjadi pendorong lahirnya kota dunia baru dengan paradigma kerja baru sebagai SMART City yang *agile*, melayani sepenuh hati, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN adalah kebijakan yang digunakan oleh Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN, sehingga didapatkan rincian jabatan dan syarat jabatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Pemerintah, serta proses pemenuhan kebutuhan yang mempertimbangkan prioritas pemenuhan Aparatur Sipil Negara secara nasional.

## B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
6. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

7. Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana (JP) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Instansi Pembina merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
15. Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

### C. JENIS JABATAN

1. Jenis Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Jenis jabatan yang dapat diisi pada pengadaan pegawai ASN tahun 2024 merupakan jabatan nonmanajerial yang terdiri atas jabatan fungsional (JF) dan jabatan pelaksana (JP).
3. Kategori jabatan pada pengadaan pegawai ASN tahun 2024 terdiri atas JF Guru, JF di bidang kesehatan dan jabatan teknis.

4. JF Guru di Instansi Pemerintah Daerah dipenuhi melalui Pengadaan PPPK.
5. JF di bidang kesehatan dipenuhi melalui Pengadaan PNS dan PPPK.
6. Jabatan teknis dipenuhi melalui Pengadaan PNS dan PPPK.
7. Daftar jenis jabatan pada pengadaan pegawai ASN tahun 2024 tercantum pada Lampiran II.
8. Instansi Pemerintah yang menjadi prioritas dalam mendukung penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pembangunan diwajibkan untuk membuka lowongan kebutuhan JF Auditor dan/atau JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Daftar Instansi Pemerintah yang menjadi prioritas tercantum pada Lampiran III.

#### D. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1. Kualifikasi pendidikan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai ASN merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang JF dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang JP.
2. Instansi Pembina JF dan Instansi Teknis JP menyampaikan rekomendasi kualifikasi pendidikan kepada BKN.
3. Berdasarkan rekomendasi Instansi Pembina JF dan Instansi Teknis JP, BKN menuangkan kualifikasi pendidikan ke dalam layanan elektronik sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN.
4. Dalam hal terdapat kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai, Menteri dapat menyesuaikan kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. UNIT PENEMPATAN

1. Unit penempatan Pegawai ASN mengacu pada peta jabatan yang disusun oleh PPK.
2. Unit penempatan pegawai ASN hanya pada satuan kerja Instansi Pemerintah, lembaga non struktural, badan layanan umum/badan layanan umum daerah, atau lembaga penyiaran publik.
3. Unit penempatan pegawai ASN tidak dapat ditempatkan pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga internasional,

badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dan badan swasta.

#### F. TATA CARA PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024

1. Setiap Instansi Pemerintah menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 berdasarkan panduan sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri ini.
2. Rincian kebutuhan disampaikan kepada Menteri dan Kepala BKN melalui layanan elektronik yang berpedoman pada petunjuk teknis yang disusun oleh BKN.
3. Rincian kebutuhan pegawai ASN paling sedikit memuat jenis pengadaan, nama jabatan, deskripsi jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, unit penempatan, dan rentang penghasilan.
4. Sebagai upaya penataan pegawai non-ASN, Instansi Pemerintah menyusun rincian kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diperuntukkan bagi Eks THK II dan pegawai non-ASN.
5. Instansi Pemerintah diwajibkan menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN kepada Menteri dan Kepala BKN paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak menerima persetujuan prinsip jumlah kebutuhan pegawai ASN.
6. BKN melakukan validasi terhadap rincian kebutuhan pegawai ASN yang terdiri atas jenis pengadaan, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan pada masing-masing kategori jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak Instansi Pemerintah menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN.
7. BKN menyampaikan pertimbangan teknis hasil validasi rincian kebutuhan pegawai ASN kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kalender sejak rincian kebutuhan pegawai ASN telah divalidasi.
8. Menteri menetapkan rincian kebutuhan pegawai ASN dengan memperhatikan pertimbangan teknis BKN.
9. Penetapan rincian kebutuhan pegawai ASN disampaikan oleh Menteri kepada PPK Instansi Pemerintah untuk selanjutnya diumumkan dalam lowongan kebutuhan.

G. PENUTUP

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI  
NOMOR 173 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN  
2024

DAFTAR JENIS JABATAN PADA RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA TAHUN 2024

A. JABATAN FUNGSIONAL

| NO. | NAMA JABATAN  | JENJANG JABATAN                | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN  |
|-----|---|--------------------------------|-----------------|--|
| 1   | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Ahli Pertama                   | CPNS            | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota              |
| 2   | Polisi Pamong Praja                                 | Pemula; Terampil; Ahli Pertama | CPNS            | Provinsi; Kabupaten; Kota                              |
| 3   | Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Terampil                       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota; Kecamatan |
| 4   | Administrator Database Kependudukan                 | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota; Kecamatan |
| 5   | Pemadam Kebakaran                                   | Pemula                         | CPNS dan PPPK   | Provinsi; Kabupaten; Kota                              |
|     |   | Terampil                       | PPPK            |  |
| 6   | Analisis Kebakaran                                  | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Provinsi; Kabupaten; Kota                              |
| 7   | Penata Perizinan                                    | Ahli Pertama                   | CPNS            | Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota            |
| 8   | Penerjemah  | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota              |
| 9   | Diplomat  | Ahli Pertama                   | CPNS            | Instansi Pembina                                       |
| 10  | Penata Kanselerai                                   | Ahli Pertama                   | CPNS            | Instansi Pembina                                       |
| 11  | Pranata Informasi Diplomatik                        | Ahli Pertama                   | CPNS            | Instansi Pembina                                       |

| NO. | NAMA JABATAN                           | JENJANG JABATAN                      | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                                       |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------|---|
| 12  | Kataloger                              | Pemula;<br>Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS            | Instansi Pembina                                |
| 13  | Analisis Pertahanan Negara             | Ahli Pertama                         | CPNS            | Instansi Pembina                                |
| 14  | Pemeriksa Merek                        | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                |
| 15  | Pemeriksa Paten                        | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                |
| 16  | Perancang Peraturan Perundang-undangan | Ahli Pertama                         | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 17  | Pemeriksa Desain Industri              | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                |
| 18  | Penyuluh Hukum                         | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 19  | Pemeriksa Keimigrasian                 | Pemula                               | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                |
| 20  | Analisis Keimigrasian                  | Ahli Pertama                         | CPNS            | Instansi Pembina                                |
| 21  | Asisten Pembimbing Kemasyarakatan      | Terampil                             | CPNS            | Instansi Pembina                                |
| 22  | Pembimbing Kemasyarakatan              | Ahli Pertama                         | CPNS            | Instansi Pembina                                |
| 23  | Kurator Keperdataan                    | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                |
| 24  | Analisis Hukum                         | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 25  | Pembina Keamanan Masyarakat            | Ahli Pertama                         | CPNS            | Instansi Pembina                                |
| 26  | Pengaman Masyarakat                    | Pemula                               | CPNS            | Instansi Pembina                                |
| 27  | Analisis Kekayaan Intelektual          | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                |
| 28  | Analisis Anggaran                      | Ahli Pertama                         | CPNS            | Instansi Pusat                                  |
| 29  | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah     | Ahli Pertama                         | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 30  | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN     | Ahli Pertama                         | CPNS            | Instansi Pembina                                |
| 31  | Pranata Keuangan APBN                  | Terampil                             | CPNS            | Instansi Pembina                                |
| 32  | Penata Laksana Barang                  | Terampil                             | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 33  | Penilai Pemerintah                     | Ahli Pertama                         | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 34  | Pengamat Gunung Api                    | Pemula; Terampil                     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                |
| 35  | Penyelidik Bumi                        | Ahli Pertama                         | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |

| NO. | NAMA JABATAN                                    | JENJANG JABATAN                | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                                   |
|-----|---|--------------------------------|-----------------|---|
| 36  | Inspektur Ketenagalistrikan                     | Ahli Pertama                   | CPNS            | Instansi Pusat; Provinsi                    |
| 37  | Inspektur Tambang                               | Ahli Pertama                   | CPNS            | Instansi Pembina                            |
| 38  | Inspektur Minyak dan Gas Bumi                   | Ahli Pertama                   | CPNS            | Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 39  | Inspektur Panas Bumi                            | Ahli Pertama                   | CPNS            | Instansi Pembina                            |
| 40  | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan          | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 41  | Asesor Manajemen Mutu Industri                  | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 42  | Pembina Industri                                | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 43  | Penguji Mutu Barang                             | Pemula; Terampil; Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 44  | Penera  | Terampil                       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
|     |   | Ahli Pertama                   | CPNS            |   |
| 45  | Pengamat Tera                                   | Pemula; Terampil               | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 46  | Pranata Laboratorium Kemetrolgian               | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 47  | Pengawas Kemetrolgian                           | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 48  | Pengawas Perdagangan                            | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 49  | Negosiator Perdagangan                          | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                            |
| 50  | Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi        | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                            |
| 51  | Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                            |
| 52  | Analisis Perdagangan                            | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 53  | Penjamin Mutu Produk                            | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                            |
| 54  | Pengawas Benih Tanaman                          | Pemula; Terampil; Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina; Provinsi                  |
| 55  | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan        | Pemula; Terampil; Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |

| NO. | NAMA JABATAN                            | JENJANG JABATAN                      | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN   |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------|---|
| 56  | Medik Veteriner                         | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 57  | Paramedik Veteriner                     | Pemula; Terampil                     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 58  | Pengawas Bibit Ternak                   | Terampil;<br>Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 59  | Pegawas Mutu Hasil Pertanian            | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 60  | Pengawas Mutu Pakan                     | Pemula;<br>Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 61  | Penyuluh Pertanian                      | Terampil;<br>Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 62  | Analisis Pasar Hasil Pertanian          | Terampil;<br>Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 63  | Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 64  | Analisis Perkarantina Tumbuhan          | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 65  | Pemeriksa Karantina Tumbuhan            | Pemula; Terampil                     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 66  | Dokter Hewan Karantina                  | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 67  | Paramedik Karantina Hewan               | Pemula; Terampil                     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 68  | Pengawas Alat dan Mesin Pertanian       | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 69  | Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian | Ahli Pertama                         | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 70  | Penyuluh Kehutanan                      | Pemula;<br>Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina;<br>Provinsi                     |
| 71  | Polisi Kehutanan                        | Pemula;<br>Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 72  | Pengendali Ekosistem Hutan              | Pemula;<br>Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina;<br>Provinsi                     |
| 73  | Pengendali Dampak Lingkungan            | Terampil;<br>Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 74  | Pengawas Lingkungan Hidup               | Ahli Pertama                         | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |

| NO. | NAMA JABATAN                                  | JENJANG JABATAN                | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                                 |
|-----|---|--------------------------------|-----------------|---|
| 75  | Penyuluh Lingkungan Hidup                     | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 76  | Manggala Agni                                 | Pemula                         | PPPK            | Instansi Pembina; Provinsi                |
|     |   | Terampil                       | CPNS dan PPPK   |   |
| 77  | Teknisi Penerbangan                           | Terampil                       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 78  | Pengawas Keselamatan Pelayaran                | Pemula; Terampil; Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 79  | Penguji Kendaraan Bermotor                    | Pemula; Terampil               | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina; Kabupaten; Kota         |
| 80  | Asisten Inspektur Angkutan Udara              | Terampil                       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 81  | Inspektur Angkutan Udara                      | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 82  | Asisten Inspektur Bandar Udara                | Terampil                       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 83  | Inspektur Bandar Udara                        | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 84  | Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan        | Terampil                       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 85  | Inspektur Keamanan Penerbangan                | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 86  | Inspektur Navigasi Penerbangan                | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 87  | Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan        | Terampil                       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 88  | Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara         | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 89  | Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara | Terampil                       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 90  | Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara         | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 91  | Asisten Inpektur Pengoperasian Pesawat Udara  | Terampil                       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 92  | Penguji Sarana Perkeretaapiaan                | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 93  | Penguji Prasarana Perkeretaapiaan             | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 94  | Inspektur Sarana Perkeretaapiaan              | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 95  | Inspektur Prasarana Perkeretaapiaan           | Ahli Pertama                   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |

| NO. | NAMA JABATAN                                      | JENJANG JABATAN        | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                                 |
|-----|---|------------------------|-----------------|---|
| 96  | Auditor Perkeretaapian                            | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 97  | Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian             | Terampil               | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 98  | Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian          | Terampil               | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 99  | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan                 | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 100 | Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan         | Pemula; Terampil       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 101 | Pengawas Perikanan                                | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina; Provinsi                |
| 102 | Asisten Pengawas Perikanan                        | Pemula; Terampil       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina; Provinsi                |
| 103 | Penyuluh Perikanan                                | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 104 | Asisten Penyuluh Perikanan                        | Terampil               | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 105 | Analisis Pasar Hasil Perikanan                    | Terampil; Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 106 | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir              | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina; Provinsi                |
| 107 | Pengelola Kesehatan Ikan                          | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 108 | Teknisi Kesehatan Ikan                            | Pemula; Terampil       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 109 | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap              | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 110 | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap      | Pemula; Terampil       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 111 | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan         | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 112 | Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Terampil               | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 113 | Inspektur Mutu Hasil Perikanan                    | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 114 | Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan            | Terampil               | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 115 | Analisis Akuakultur                               | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |

| NO. | NAMA JABATAN  | JENJANG JABATAN  | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                                   |
|-----|---|------------------|-----------------|---|
| 116 | Teknisi Akuakultur                                    | Pemula; Terampil | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 117 | Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan                    | Ahli Pertama     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina; Provinsi                  |
| 118 | Pengawas Ketenagakerjaan                              | Ahli Pertama     | CPNS            | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 119 | Instruktur  | Ahli Pertama     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 120 | Mediator Hubungan Industrial                          | Ahli Pertama     | CPNS            | Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 121 | Pengantar Kerja                                       | Ahli Pertama     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 122 | Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja               | Ahli Pertama     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi                    |
| 123 | Penggerak Swadaya Masyarakat                          | Ahli Pertama     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 124 | Pembina Jasa Konstruksi                               | Ahli Pertama     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 125 | Pengelola Sumber Daya Air                             | Ahli Pertama     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 126 | Penata Laksana Sumber Daya Air                        | Pemula; Terampil | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 127 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan                      | Ahli Pertama     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 128 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan                     | Pemula; Terampil | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 129 | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman  | Ahli Pertama     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 130 | Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman | Pemula; Terampil | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 131 | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan                   | Ahli Pertama     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 132 | Penata Laksana Penyehatan Lingkungan                  | Pemula; Terampil | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 133 | Penata Kelola Perumahan                               | Ahli Pertama     | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |

| NO. | NAMA JABATAN   | JENJANG JABATAN   | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                                 |
|-----|--|---|-----------------|---|
| 134 | Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan | Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 135 | Penata Ruang   | Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 136 | Penata Kadastral   | Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 137 | Asisten Penata Kadastral                                       | Pemula; Terampil  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 138 | Penata Pertanahan  | Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 139 | Administrator Kesehatan  | Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 140 | Apoteker   | Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 141 | Asisten Apoteker   | Terampil  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 142 | Bidan  | Terampil; Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 143 | Dokter   | Ahli Pertama (Dokter Umum/Spesialis); Ahli Muda (Dokter Sub Spesialis)  | CPNS            | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
|     |  | Ahli Pertama (Dokter Umum); Ahli Muda (Dokter Spesialis/ Sub Spesialis) | PPPK            |   |
| 144 | Dokter Gigi  | Ahli Pertama (Dokter Gigi/Spesialis)                                    | CPNS            | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
|     |  | Ahli Pertama (Dokter Gigi); Ahli Muda (Dokter Gigi Spesialis)           | PPPK            |   |
| 145 | Entomolog Kesehatan  | Terampil; Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 146 | Epidemiolog Kesehatan  | Terampil; Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 147 | Fisioterapis   | Terampil; Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 148 | Fisikawan Medis  | Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 149 | Nutrisionis  | Terampil; Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |

| NO. | NAMA JABATAN                               | JENJANG JABATAN  | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                                       |
|-----|--|--|-----------------|---|
| 150 | Okupasi Terapis                            | Terampil   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 151 | Ortotis Prostetis                          | Terampil   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 152 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | Terampil;<br>Ahli Pertama                              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 153 | Perawat                                    | Terampil;<br>Ahli Pertama                              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 154 | Terapis Gigi dan Mulut                     | Terampil;<br>Ahli Pertama                              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 155 | Perekam Medis                              | Terampil;<br>Ahli Pertama                              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 156 | Pranata Laboratorium Kesehatan             | Terampil;<br>Ahli Pertama                              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 157 | Psikolog Klinis                            | Ahli Pertama   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 158 | Radiografer                                | Terampil;<br>Ahli Pertama                              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 159 | Refraksionis Optisien                      | Terampil   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 160 | Tenaga Sanitasi Lingkungan                 | Terampil;<br>Ahli Pertama                              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 161 | Teknisi Elektromedis                       | Terampil;<br>Ahli Pertama                              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 162 | Teknisi Gigi                               | Terampil   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 163 | Teknisi Transfusi Darah                    | Terampil   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 164 | Terapis Wicara                             | Terampil   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 165 | Dokter Pendidik Klinis                     | Ahli Pertama (Spesialis);<br>Ahli Muda (Sub Spesialis) | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
|     |  | Ahli Muda (Spesialis/<br>Sub Spesialis)                | PPPK            |   |
| 166 | Pembimbing Kesehatan Kerja                 | Ahli Pertama   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 167 | Asisten Penata Anestesi                    | Terampil   | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |

| NO. | NAMA JABATAN                      | JENJANG JABATAN           | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN   |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| 168 | Penata Anestesi                   | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 169 | Dosen                             | Asisten Ahli              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat                                    |
|     |                                   | Lektor                    | CPNS dan PPPK   |   |
|     |                                   | Lektor Kepala             | PPPK            |   |
| 170 | Guru                              | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat                                    |
|     |                                   |                           | PPPK            | Provinsi; Kabupaten;<br>Kota                      |
| 171 | Pamong Belajar                    | Ahli Pertama              | PPPK            | Instansi Pembina;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 172 | Pengawas Sekolah                  | Ahli Muda                 | PPPK            | Provinsi; Kabupaten;<br>Kota                      |
| 173 | Pengembang Teknologi Pembelajaran | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 174 | Pranata Laboratorium Pendidikan   | Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 175 | Pamong Budaya                     | Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 176 | Widyaprada                        | Ahli Pertama              | PPPK            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 177 | Pengembang Kurikulum              | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 178 | Pengembang Penilaian Pendidikan   | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 179 | Widyabasa                         | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 180 | Pekerja Sosial                    | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 181 | Penyuluh Sosial                   | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 182 | Penghulu                          | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 183 | Penyuluh Agama                    | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 184 | Pentashih Mushaf Al Quran         | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 185 | Pengembang Tafsir Al-Qur'an       | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 186 | Pengawas Jaminan Produk Halal     | Ahli Pertama              | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 187 | Pranata Hubungan Masyarakat       | Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 188 | Teknisi Siaran                    | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 189 | Asisten Teknisi Siaran            | Pemula; Terampil          | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |

| NO. | NAMA JABATAN   | JENJANG JABATAN        | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                                 |
|-----|--|------------------------|-----------------|---|
| 190 | Pranata Siaran   | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 191 | Asisten Pranata Siaran                                 | Pemula; Terampil       | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 192 | Pengendali Frekuensi Radio                             | Terampil; Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 193 | Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio                 | Ahli Pertama           | CPNS            | Instansi Pembina                          |
| 194 | Penguji Perangkat Telekomunikasi                       | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 195 | Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi               | Terampil               | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |
| 196 | Inspektur Pos dan Informatika                          | Ahli Pertama           | CPNS            | Instansi Pembina                          |
| 197 | Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika             | Ahli Pertama           | CPNS            | Instansi Pembina                          |
| 198 | Perencana  | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 199 | Pelatih Olahraga                                       | Ahli Pertama           | CPNS            | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 200 | Asisten Pelatih Olahraga                               | Pemula; Terampil       | CPNS            | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 201 | Pengawas Koperasi                                      | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 202 | Pengembang Kewirausahaan                               | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 203 | Widyaiswara  | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 204 | Analisis Kebijakan                                     | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 205 | Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 206 | Arsiparis  | Terampil; Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 207 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur                  | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 208 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur                   | Terampil               | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 209 | Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara                | Ahli Pertama           | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                          |

| NO. | NAMA JABATAN  | JENJANG JABATAN         | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                                   |
|-----|---|-------------------------|-----------------|---|
| 210 | Asesor SDM Aparatur                                 | Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 211 | Pustakawan  | Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 212 | Asisten Perpustakaan                                | Terampil                | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 213 | Statistisi  | Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 214 | Asisten Statistisi                                  | Terampil                | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 215 | Pranata Komputer                                    | Terampil; Ahli Pertama  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 216 | Pengawas Radiasi                                    | Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 217 | Peneliti  | Ahli Pertama; Ahli Muda | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota |
| 218 | Teknisi Perkebunrayaan                              | Pemula; Terampil        | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 219 | Analisis Perkebunrayaan                             | Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 220 | Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 221 | Kurator Koleksi Hayati                              | Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 222 | Penata Penerbitan Ilmiah                            | Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 223 | Analisis Data Ilmiah                                | Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 224 | Teknisi Penelitian dan Perencanaan                  | Terampil                | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 225 | Perekayasa  | Ahli Pertama            | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota   |
| 226 | Agen Intelijen                                      | Ahli Pertama            | CPNS            | Instansi Pembina                            |
| 227 | Asisten Agen Intelijen                              | Terampil                | CPNS            | Instansi Pembina                            |
| 228 | Analisis Intelijen                                  | Ahli Pertama            | CPNS            | Instansi Pembina                            |
| 229 | Pengawas Intelijen                                  | Ahli Pertama            | CPNS            | Instansi Pembina                            |
| 230 | Pengembang Sistem Intelijen                         | Ahli Pertama            | CPNS            | Instansi Pembina                            |

| NO. | NAMA JABATAN                               | JENJANG JABATAN           | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN   |
|-----|--|---------------------------|-----------------|---|
| 231 | Penata Kelola Intelijen                    | Ahli Pertama              | CPNS            | instansi Pembina                                  |
| 232 | Asisten Penata Kelola Intelijen            | Pemula; Terampil          | CPNS            | instansi Pembina                                  |
| 233 | Sandiman                                   | Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 234 | Manggala Informatika                       | Ahli Pertama              | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 235 | Penyuluh Keluarga Berencana                | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina;<br>Pemprov DKI Jakarta          |
| 236 | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana | Ahli Pertama              | CPNS            | Instansi Pembina;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota |
| 237 | Petugas Lapangan Keluarga Berencana        | Pemula                    | PPPK            | Instansi Pembina;<br>Pemprov DKI Jakarta          |
|     |  | Terampil                  | CPNS dan PPPK   |   |
| 238 | Surveyor Pemetaan                          | Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 239 | Auditor                                    | Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS            | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 240 | Analisis Ketahanan Pangan                  | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 241 | Pengawas Farmasi dan Makanan               | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 242 | Pengamat Meteorologi dan Geofisika         | Terampil;<br>Ahli Pertama | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |
| 243 | Jaksa                                      | Ahli Pertama              | CPNS            | Instansi Pembina                                  |
| 244 | Pemeriksa                                  | Ahli Pertama              | CPNS            | Instansi Pembina                                  |
| 245 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa            | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 246 | Pranata Pencarian Pertolongan              | Pemula; Terampil          | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 247 | Penyuluh Narkoba                           | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 248 | Penyidik Badan Narkotika Nasional          | Ahli Pertama              | CPNS            | Instansi Pembina                                  |
| 249 | Konselor Adiksi                            | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 250 | Asisten Konselor Adiksi                    | Terampil                  | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat;<br>Provinsi; Kabupaten;<br>Kota   |
| 251 | Analisis APBN                              | Ahli Pertama              | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina                                  |

| NO. | NAMA JABATAN  | JENJANG JABATAN | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN   |
|-----|---|-----------------|-----------------|---|
| 252 | Perisalah Legislatif  | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Wilayah Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh |
| 253 | Asisten Perisalah Legislatif                                | Terampil        | CPNS dan PPPK   | Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Wilayah Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh |
| 254 | Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik  |

| NO. | NAMA JABATAN                                 | JENJANG JABATAN | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN  |
|-----|--|-----------------|-----------------|--|
|     |  |                 |                 | Indonesia  |
| 255 | Analisis Legislatif                          | Ahli Pertama    | CPNS            | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia |
| 256 | Analisis Transaksi Keuangan                  | Ahli Pertama    | CPNS            | Instansi Pembina   |
| 257 | Penata Kelola Pemilihan Umum                 | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina   |
| 258 | Pranata Peradilan                            | Ahli Pertama    | CPNS            | Instansi Pembina   |
| 259 | Analisis Standardisasi                       | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat   |
| 260 | Metrolog                                     | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat   |
| 261 | Penata Kelola Perusahaan Negara              | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina   |
| 262 | Penata Kehakiman                             | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina   |
| 263 | Analisis Kebencanaan                         | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota  |
| 264 | Penata Penanggulangan Bencana                | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota  |
| 265 | Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif    | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota  |
| 266 | Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia    | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina   |
| 267 | Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Ahli Pertama    | CPNS            | Instansi Pembina   |
| 268 | Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  | Terampil        | CPNS            | Instansi Pembina   |
| 269 | Penyelidik Tindak Pidana Korupsi             | Ahli Pertama    | CPNS            | Instansi Pembina   |
| 270 | Penata Perlindungan Saksi Dan Korban         | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina   |
| 271 | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum      | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pembina   |
| 272 | Penata Kelola Penanaman Modal                | Ahli Pertama    | CPNS dan PPPK   | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota  |
| 273 | Analisis Kerja Sama                          | Ahli Pertama    | CPNS            | Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota  |

B. JABATAN PELAKSANA

1) KLASIFIKASI KLEREK

| NAMA JABATAN   | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                               |
|--|-----------------|---|
| Pengadministrasi Perkantoran                           | PPPK            | Instansi Pemerintah                     |
| Penata Kelola Pemasarakatan                            | CPNS            | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan             | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan           | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Pengelola Administrasi Pemasarakatan                   | CPNS            | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| Pengelola Sarana Pemasarakatan                         | CPNS            | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| Dokumentalis Hukum                                     | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi           | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Fasilitator Rehabilitasi                               | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Konselor SDM   | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Penata Kelola Pemerintahan                             | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Analisis Perkara Peradilan                             | CPNS            | Sekretariat Mahkamah Agung              |
| Pengelola Rumah Aman                                   | CPNS            | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban   |
| Pengawas Pendataan Statistik                           | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Desainer Buku  | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Ilustrator Buku  | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Pengembang Buku Elektronik                             | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Penelaah Pengembangan Standar                          | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Penelaah Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian       | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |
| Penelaah Teknis Intelijen                              | CPNS            | BIN                                     |
| Pengolah Data Intelijen                                | CPNS            | BIN                                     |
| Pengelola Administrasi Intelijen                       | CPNS            | BIN                                     |
| Pengelola Penanganan Perkara                           | CPNS            | Kejaksaan Agung                         |
| Petugas Barang Bukti                                   | CPNS            | Kejaksaan Agung                         |
| Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | CPNS            | Instansi Pemerintah                     |

| NAMA JABATAN   | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN           |
|--|-----------------|---------------------|
| Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Penata Keprotokolan  | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Pengelola Keprotokolan                                     | CPNS            | Instansi Pemerintah |

## 2) KLASIFIKASI OPERATOR

| NAMA JABATAN                                       | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                 |
|--|-----------------|---------------------------|
| Penata Layanan Operasional                         | PPPK            | Instansi Pemerintah       |
| Pengelola Layanan Operasional                      | PPPK            | Instansi Pemerintah       |
| Operator Layanan Operasional                       | PPPK            | Instansi Pemerintah       |
| Pengelola Umum Operasional                         | PPPK            | Instansi Pemerintah       |
| Pengelola Trantibum                                | PPPK            | Instansi Daerah           |
| Pranata Trantibum                                  | PPPK            | Instansi Daerah           |
| Penjaga Tahanan                                    | CPNS            | Kementerian Hukum dan HAM |
| Petugas Pengamanan Masyarakat                      | CPNS            | Kementerian Hukum dan HAM |
| Protokol Kenegaraan                                | CPNS            | Instansi Pusat Tertentu   |
| Pengendali Konten Internet                         | CPNS            | Instansi Pemerintah       |
| Pemeriksa Forensik Digital                         | CPNS            | Instansi Pemerintah       |
| Penata Pemberantasan Narkotika                     | CPNS            | Badan Narkotika Nasional  |
| Penata Kelola Kelautan dan Perikanan               | CPNS            | Instansi Pemerintah       |
| Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan           | CPNS            | Instansi Pemerintah       |
| Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan | CPNS            | Instansi Pemerintah       |
| Fasilitator Bela Negara                            | CPNS            | Kementerian Pertahanan    |
| Pengelola Pencarian dan Pertolongan                | CPNS            | Instansi Pemerintah       |
| Fasilitator Pemerintahan                           | CPNS            | Instansi Pemerintah       |
| Pranata Kewilayahan                                | CPNS            | Instansi Pemerintah       |
| Pamong Pemerintahan                                | CPNS            | Instansi Pemerintah       |
| Pengawas Penyelenggara Pemilu                      | CPNS            | Instansi Pemerintah       |

| NAMA JABATAN   | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN           |
|--|-----------------|---------------------|
| Konsultan Industri                                     | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Pengawas Industri                                      | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Pelatih dan Perawat Satwa Liar                         | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Pemelihara Tumbuhan                                    | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Petugas Pengaman Hutan dan Hasil Hutan                 | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara                  | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Fasilitator Bahasa Isyarat                             | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Penata Kelola Obat dan Makanan                         | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Pengelola Layanan Kesehatan                            | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Operator Layanan Kesehatan                             | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Penata Kelola Layanan Kesehatan                        | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Pawang Anjing Pelacak                                  | CPNS            | Instansi Pusat      |
| Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang                  | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Penyuluh Bahasa  | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Perevitalisasi Bahasa dan Sastra                       | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Editor Buku  | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Konservator  | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Kurator  | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Edukator   | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Polisi Khusus Cagar Budaya                             | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Juru Pelihara Cagar Budaya                             | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Penata Pameran   | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Registrar  | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Pengawas Hasil Penyensoran                             | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran             | CPNS            | Instansi Pemerintah |
| Penata Kelola Pertambangan                             | CPNS            | Instansi Pemerintah |

| NAMA JABATAN   | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN               |
|--|-----------------|-------------------------|
| Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan  | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Pengawas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi                        | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Pengelola Keselamatan Ketenagalistrikan  | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Petugas Survei Geologi   | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Pengawas Jaringan Utilitas   | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Teknisi Sarana dan Prasarana   | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air                                  | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Petugas Operasi dan Pemeliharaan   | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Penata Bangunan Gedung dan Permukiman  | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Penata Kelola Pengadaan Tanah  | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Operator Alat Berat  | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Petugas Transportasi Darat   | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Petugas Transportasi Perkeretaapian  | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Pengawas Transportasi Darat  | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Pengawas Transportasi Perkeretaapian   | CPNS            | Instansi Pemerintah     |
| Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi                                      | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi                                  | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Pengatur Perjalanan Kereta Api   | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Awak Sarana Perkeretaapian   | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Teknisi Perkeretaapian   | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian                                     | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Pemeriksa Kecelakaan Kereta Api  | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Personel Operasional Bandar Udara  | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Personel Teknik dan Operasional Penerbangan Bidang Faskampem                   | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Personel Teknik dan Operasional Penerbangan Bidang Teknisi Peralatan dan Mesin | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Pengevaluasi Penerbangan   | CPNS            | Kementerian Perhubungan |

| NAMA JABATAN   | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN               |
|--|-----------------|-------------------------|
| Pengawas Penerbangan                                 | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Personel Perawatan Pesawat Udara                     | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Pengawas Operasional Bandar Udara                    | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Personel Perawatan Peralatan Kalibrasi Penerbangan   | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Petugas Unit Bengkel Keselamatan Pelayaran           | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Penguji Peralatan Keselamatan Pelayaran              | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Petugas Laboratorium Peralatan Keselamatan Pelayaran | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Petugas Telkompel                                    | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Pengawas Pemanduan Kapal                             | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan                      | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Pengawas Sarana dan Prasarana Kenavigasian           | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran          | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Pengawas Penanggulangan Pencemaran dan Musibah SAR   | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Pengawas Salvage dan Pekerjaan Bawah Air             | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Penata Keselamatan Pelayaran                         | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Penata Penegakan Hukum dan Diseminasi                | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Penata Keselamatan dan Keamanan Pelayaran            | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Penilik Angkutan Laut                                | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Teknisi Menara Suar                                  | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Penjaga Menara Suar                                  | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Marine Radio   | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Perekayasa Teknologi dan Pemberitaan                 | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Surveyor Kenavigasian                                | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Pengelola Peralatan Keselamatan Pelayaran            | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Investigator Keselamatan Pelayaran                   | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Auditor ISPS Code                                    | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Surveyor Pengangkutan Barang Berbahaya               | CPNS            | Kementerian Perhubungan |

| NAMA JABATAN               | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN               |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Penilik Kenavigasian       | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Penilik Kepelabuhanan      | CPNS            | Kementerian Perhubungan |
| Penilik Kelaiklautan Kapal | CPNS            | Kementerian Perhubungan |

### 3) KLASIFIKASI TEKNISI

| NAMA JABATAN   | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                    |
|--|-----------------|------------------------------|
| Petugas Ukur Kawasan Hutan   | CPNS            | Instansi Pemerintah          |
| Pengendali Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PLB3) | CPNS            | Instansi Pemerintah          |
| Teknisi Mesin Alat Berat   | CPNS            | Instansi Pemerintah          |
| Nakhoda Kapal Kelas I  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Nakhoda Kapal Kelas II   | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Nakhoda Kapal Kelas III  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Nakhoda Kapal Kelas IV   | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Nakhoda Kapal Kelas V  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas I   | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas II  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas III                                       | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas V   | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Mualim I Kapal Kelas I   | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Mualim I Kapal Kelas II  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Mualim I Kapal Kelas III   | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Mualim I Kapal Kelas IV  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Mualim II Kapal Kelas I  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Mualim II Kapal Kelas II   | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Mualim II Kapal Kelas III  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Mualim III Kapal Kelas I   | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |

| NAMA JABATAN                  | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                    |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Mualim III Kapal Kelas II     | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Mualim III Kapal Kelas III    | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Masinis I Kapal Kelas I       | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Masinis I Kapal Kelas II      | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Masinis I Kapal Kelas III     | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Masinis I Kapal Kelas IV      | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Masinis II Kapal Kelas I      | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Masinis II Kapal Kelas II     | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Masinis II Kapal Kelas III    | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Masinis III Kapal Kelas I     | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Masinis III Kapal Kelas II    | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Markonis Kapal Kelas I        | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Markonis Kapal Kelas II       | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Markonis Kapal Kelas III      | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Serang Kapal Kelas I          | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Serang Kapal Kelas II         | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Serang Kapal Kelas III        | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Mandor Mesin Kapal Kelas I    | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Mandor Mesin Kapal Kelas II   | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kerani Kapal Kelas I          | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kerani Kapal Kelas II         | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kerani Kapal Kelas III        | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kasab Deck Kapal Kelas I      | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kasab Deck Kapal Kelas II     | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kasab Mesin Kapal Kelas I     | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Penyelam Scuba Kapal Kelas I  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Penyelam Scuba Kapal Kelas II | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |

| NAMA JABATAN                                   | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                    |
|--|-----------------|------------------------------|
| Penyelam Scuba Kapal Kelas III                 | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Konstabel Kapal Kelas I                        | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Konstabel Kapal Kelas II                       | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Konstabel Kapal Kelas III                      | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Tenaga Penanggulangan Pencemaran Kapal Kelas I | CPNS            | Kementerian Perhubungan      |
| Teknisi Listrik Kapal Kelas I                  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Teknisi Listrik Kapal Kelas II                 | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Minyak Kapal Kelas I                      | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Minyak Kapal Kelas II                     | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Minyak Kapal Kelas III                    | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Jenang Kapal Kelas I                           | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Jenang Kapal Kelas II                          | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Mudi Kapal Kelas I                        | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Mudi Kapal Kelas II                       | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Mudi Kapal Kelas III                      | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kelasi Kapal Kelas I                           | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kelasi Kapal Kelas II                          | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kelasi Kapal Kelas III                         | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kelasi Kapal Kelas IV                          | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Kelasi Kapal Kelas V                           | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Mesin Kapal Kelas I                       | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Mesin Kapal Kelas II                      | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Mesin Kapal Kelas III                     | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Masak Kapal Kelas I                       | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Masak Kapal Kelas II                      | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Masak Kapal Kelas III                     | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |
| Juru Cuci Kapal Kelas I                        | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |

| NAMA JABATAN                                | JENIS PENGADAAN | KEDUDUKAN                    |
|---|-----------------|------------------------------|
| Personel Penerbangan Bidang Avsec           | CPNS            | Kementerian Perhubungan      |
| Personel Penerbangan Bidang PKP-PK          | CPNS            | Kementerian Perhubungan      |
| Pengawas Personel Penerbangan Bidang Avsec  | CPNS            | Kementerian Perhubungan      |
| Pengawas Personel Penerbangan Bidang PKP-PK | CPNS            | Kementerian Perhubungan      |
| Co - Pilot                                  | CPNS            | Instansi Pemerintah tertentu |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI  
NOMOR 173 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN  
2024

DAFTAR INSTANSI YANG MENJADI PRIORITAS DALAM PENGUATAN PERAN  
APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP)

| NO. | INSTANSI                    | JF PPUPD | JF AUDITOR |
|-----|-----------------------------|----------|------------|
| 1   | Kabupaten Aceh Jaya         | V        |            |
| 2   | Kabupaten Aceh Tenggara     | V        |            |
| 3   | Kabupaten Asmat             |          | V          |
| 4   | Kabupaten Banggai Kepulauan | V        |            |
| 5   | Kabupaten Barito Timur      | V        |            |
| 6   | Kabupaten Batu Bara         | V        |            |
| 7   | Kabupaten Boalemo           | V        |            |
| 8   | Kabupaten Bojonegoro        | V        |            |
| 9   | Kabupaten Bulungan          | V        |            |
| 10  | Kabupaten Buru Selatan      | V        |            |
| 11  | Kabupaten Deiyai            |          | V          |
| 12  | Kabupaten Dogiyai           |          | V          |
| 13  | Kabupaten Ende              |          | V          |
| 14  | Kabupaten Fak-Fak           |          | V          |
| 15  | Kabupaten Halmahera Barat   | V        |            |
| 16  | Kabupaten Halmahera Utara   | V        |            |

| NO. | INSTANSI                      | JF PPUPD | JF AUDITOR |
|-----|-------------------------------|----------|------------|
| 17  | Kabupaten Jayawijaya          | V        |            |
| 18  | Kabupaten Jombang             | V        |            |
| 19  | Kabupaten Karimun             | V        |            |
| 20  | Kabupaten Kepahiang           | V        |            |
| 21  | Kabupaten Kolaka Utara        | V        |            |
| 22  | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | V        |            |
| 23  | Kabupaten Lanny Jaya          |          | V          |
| 24  | Kabupaten Lingga              | V        |            |
| 25  | Kabupaten Maluku Barat Daya   |          | V          |
| 26  | Kabupaten Maluku Tengah       | V        |            |
| 27  | Kabupaten Mamberamo Raya      |          | V          |
| 28  | Kabupaten Mamberamo Tengah    |          | V          |
| 29  | Kabupaten Manokwari Selatan   |          | V          |
| 30  | Kabupaten Maybrat             |          | V          |
| 31  | Kabupaten Mimika              |          | V          |
| 32  | Kabupaten Murung Raya         | V        |            |
| 33  | Kabupaten Nagekeo             | V        |            |
| 34  | Kabupaten Nagan Raya          | V        |            |
| 35  | Kabupaten Nias Barat          | V        |            |
| 36  | Kabupaten Padang Lawas        | V        |            |
| 37  | Kabupaten Pamekasan           | V        |            |
| 38  | Kabupaten Pasuruan            | V        |            |
| 39  | Kabupaten Pegunungan Arfak    |          | V          |
| 40  | Kabupaten Puncak Jaya         |          | V          |
| 41  | Kabupaten Sabu Rajjua         |          | V          |
| 42  | Kabupaten Seram Bagian Timur  | V        |            |

| NO. | INSTANSI                       | JF PPUPD | JF AUDITOR |
|-----|--------------------------------|----------|------------|
| 43  | Kabupaten Simeulue             | V        |            |
| 44  | Kabupaten Sleman               | V        |            |
| 45  | Kabupaten Sorong Selatan       |          | V          |
| 46  | Kabupaten Sumba Barat Daya     | V        |            |
| 47  | Kabupaten Sumba Tengah         |          | V          |
| 48  | Kabupaten Sumenep              | V        |            |
| 49  | Kabupaten Sumba Barat          | V        |            |
| 50  | Kabupaten Supiori              |          | V          |
| 51  | Kabupaten Tambrau              |          | V          |
| 52  | Kabupaten Tana Toraja          | V        |            |
| 53  | Kabupaten Tanimbar             |          | V          |
| 54  | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | V        |            |
| 55  | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | V        |            |
| 56  | Kabupaten Tapanuli Tengah      | V        |            |
| 57  | Kabupaten Teluk Bentuni        |          | V          |
| 58  | Kabupaten Temanggung           | V        |            |
| 59  | Kabupaten Tolikara             | V        |            |
| 60  | Kabupaten Waropen              | V        |            |
| 61  | Kabupaten Waropen              |          | V          |
| 62  | Kabupaten Yahukimo             | V        |            |
| 63  | Kabupaten Yalimo               | V        |            |
| 64  | Kabupaten Yalimo               |          | V          |
| 65  | Kota Langsa                    | V        |            |
| 66  | Kota Lhokseumawe               | V        |            |
| 67  | Kota Pagar Alam                | V        |            |
| 68  | Kota Pasuruan                  | V        |            |

| NO.   | INSTANSI                  | JF PPUPD | JF AUDITOR |
|-------|---------------------------|----------|------------|
| 69    | Kota Sabang               | V        |            |
| 70    | Kota Sorong               |          | V          |
| 71    | Kota Surabaya             | V        |            |
| 72    | Provinsi Papua Pegunungan | V        | V          |
| 73    | Provinsi Papua Selatan    | V        | V          |
| 74    | Provinsi Papua Tengah     | V        | V          |
| TOTAL |                           | 50       | 27         |

Keterangan:

V = Jabatan yang wajib diusulkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS